
Upaya United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Mengatasi Ketimpangan Gender di Bawah Pemerintahan Taliban Pada Periode 2023-2024

Eunike Irene Pote^{1*}, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : eunikepote90@gmail.com

Article History:

Received : 01-07-2025

Accepted : 07-07-2025

Keywords: Taliban; UNAMA; PBB; Pendidikan; Pekerjaan; Feminisme Liberal

ABSTRAK

Isu mengenai ketimpangan gender masih menjadi pembahasan utama dalam pewujudan keadilan dan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan harus tetap digencarkan di dunia modern ini, karena ini merupakan faktor pendukung kestabilan dunia. Afghanistan menjadi salah satu negara dengan tingkat diskriminasi gender paling tinggi di dunia semenjak berkuasanya Taliban 4 tahun lalu. Menanggapi hal ini, organisasi internasional yaitu PBB melakukan upaya untuk menghentikan praktik tindakan yang terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia Melalui United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), merupakan misi yang dikhususkan untuk menangani kasus yang terjadi di Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran PBB melalui UNAMA dan Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Rezim Taliban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penggunaan teori menggunakan teori Feminisme Liberal dan Teori Peran Organisasi Internasional. Hasil atau temuan penelitian, dalam kurun waktu 4 tahun sejak kembalinya Taliban, UNAMA berhasil melakukan upaya yang cukup signifikan di beberapa provinsi Afghanistan.

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan dunia internasional dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami perubahan, namun masih ada beberapa negara yang kaum perempuannya menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, politik, dan juga kesehatan. Masih banyak perempuan di beberapa belahan negara yang dasingkan dalam pengambilan keputusan lokal maupun internasional. Ketimpangan gender tidak saja akan mempengaruhi individu, namun juga akan berdampak pada stabilitas negara. Tingkat populasi kaum perempuan di dunia mencapai hampir separuh dari populasi manusia di dunia (Bank Dunia, 2023) sehingga perempuan menjadi salah satu penentu keberlanjutan ekonomi dan juga pembangunan sosial untuk mencapai stabilitas dan perdamaian dunia. Ketimpangan gender menjadi salah satu fokus dalam upaya penyelesaian masalah internasional, karena di dunia modern seperti ini, ketimpangan gender bukan lagi mengenai isu biasa tetapi sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran Hak Asasi Manusia terkhususnya bagi kaum perempuan. Untuk mencapai dunia internasional yang stabil, damai, dan berkelanjutan banyak negara-negara dan juga organisasi internasional seperti PBB yang mengupayakan

penekanan ketimpangan gender di beberapa wilayah negara yang masih terindikasi ketimpangan gender yang tinggi. Beberapa diantaranya yaitu Yaman, Papua Nugini, Nigeria, Afghanistan, dan juga Afrika Tengah. Kelima negara tersebut menjadi fokus pengupayaan penekanan ketimpangan gender (UNDP 2023). Upaya kesetaraan Gender menjadi salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) oleh PBB.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender seperti norma sosial dan budaya dimana adanya perspektif bahwa beberapa pekerjaan tidak layak atau tidak mampu dikerjakan oleh perempuan, kemudian kemajuan teknologi yang juga menjadi salah satu faktor pendukung dan ini biasanya banyak terjadi di negara-negara berkembang dan bahkan terbelakang. Kemajuan teknologi disini maksudnya yaitu kurangnya pengetahuan bahwa di bagian bumi lainnya, gender atau jenis kelamin bukan lagi penentu bagi seseorang untuk berkecimpung atau melakukan segala aspek yang biasa dilakukan oleh orang-orang, sehingga banyak wilayah yang masih menjalankan sistem ketimpangan gender tersebut. lalu terdapat juga kebijakan publik yang menjadi faktor pendorong ketimpangan gender, karena di beberapa negara ada yang tidak mengatur atau membuat undang-undang mengenai kesetaraan gender sehingga diskriminasi mengenai kesetaraan gender sangat marak terjadi.

Ketimpangan gender juga identik dengan budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan suatu budaya yang juga sudah terkonstruksi sejak zaman dahulu. Budaya patriarki menjadikan perempuan sebagai kaum yang cukup berfokus pada rutinitas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak, suami, dan juga lainnya. Partisipasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga pendidikan bukanlah hal yang wajib dilakukan oleh kaum perempuan, karena dianggap melenceng jauh dari tugas utama sebagai ibu rumah tangga serta keterlibatan dalam aspek-aspek tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab laki-laki. Pembatasan-pembatasan seperti ini selalu menempatkan posisi perempuan seperti terpenjara dan akan selalu terbelakang. Selain itu nilai agama yang konservatif juga mendukung budaya patriarki ini terus berkembang.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Afghanistan menjadi salah negara dengan tingkat ketimpangan gender paling tinggi di dunia yang juga merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar dunia dengan persentase 85% menganut aliran Sunni dan 15% yaitu Muslim Syiah. Umat minoritas yaitu Syiah juga kerap mendapatkan diskriminasi dari pihak-pihak Sunni, sehingga ini juga memperparah konflik internal yang terjadi di negara tersebut. negara ini juga memiliki sejarah politik yang panjang. Sebelum merdeka di tahun 1919, Afghanistan dijadikan sebagai alat untuk memperluas wilayah kekuasaan oleh kekuatan besar yaitu AS, Uni Soviet, dan juga Inggris. Selama masa penjajahan tersebut, Afghanistan berada di posisi yang sangat tidak stabil baik ekonomi, politik, dan juga sosialnya. Kemudian setelah waktu yang panjang, pada akhirnya Afghanistan merdeka dari Inggris, dimana Inggris merupakan satu-satunya negara terakhir yang menjajah di abad ke 18 tersebut. Afghanistan berdiri sebagai negara baru yang menerapkan sistem monarki absolut dan amanullah Khan mendeklarasikan kemerdekaannya serta menyatakan dirinya sebagai raja di negara tersebut. Di awal pemerintahan Amanullah Khan, Afghanistan bisa dikatakan sebagai negara baru merdeka yang cukup stabil karena adanya upaya pembaharuan negara oleh Amanullah Khan bersama istrinya. Namun upaya tersebut hanya berlangsung selama 10 tahun, dimana kekuasaan Amanullah di kudeta. Runtuhnya kekuasaan Amanullah Khan menjadi awal

konflik internal yang berkepanjangan bagi negara tersebut. yang kemudian akhirnya kelompok Taliban mulai masuk dan menguasai Afghanistan di tahun 1994.

Pada tahun 1994, Taliban muncul di Afghanistan sebagai kelompok yang bertujuan memperbaiki sistem negara yang sedang tidak stabil akibat perang saudara dan invasi Soviet. Dipimpin oleh Mohammad Omarkel, mereka kecewa karena penerapan hukum Islam yang tidak konsisten dan adanya kekerasan serta korupsi. Dalam lima tahun, Taliban menguasai sekitar 90% wilayah Afghanistan, termasuk kota-kota besar seperti Kandahar, Jalalabad, Herat, dan Kabul, dengan dukungan dari warga setempat, Pakistan, dan AS. Mereka mengambil alih sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial berdasarkan ideologi doebandi konservatif, menerapkan aturan kontroversial seperti penolakan hak perempuan, kewajiban berjenggot bagi laki-laki, dan pemakaian burqa bagi perempuan, yang sering dihukum secara keras jika dilanggar.

Hal ini mengundang perhatian dunia dan juga organisasi internasional. Pada tahun 2001, rezim Taliban ini digulingkan oleh AS karena adanya dugaan kuat jika Taliban melindungi kepala pemimpin Al-Qaeda yang juga diduga sebagai ketua dari terjadinya peristiwa bom di gedung WTC Amerika Serikat pada September 2001. AS bersama sekutunya melancarkan serangan setelah Presiden AS saat itu yakni George Bush mengeluarkan kebijakan anti teror yang kontroversial dan menjadikan Taliban sebagai Targe Utama dalam penyerangan ini. Invasi mulai dilakukan dari bulan Oktober hingga November, serangan ganas yang dilakukan oleh AS, membuat kelompok Taliban kewalahan sehingga tepat pada tanggal 12 November Taliban resmi mundur dari pemerintahan Afghanistan. namun setelah 20 tahun berlalu, tepatnya di tanggal 30 September 2021 setelah AS mulai menarik pasukan militer, sekutu, dan juga NATO dari Afghanistan setelah ditandatangani *Doha Agreement*. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Taliban kembali untuk menguasai Afghanistan yang dimulai dari kawasan Kunduz, Kandahar, hingga Kabul dalam waktu yang sangat singkat yaitu 1 hari saja.

Kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan, menjadikannya sebagai negara yang sangat tidak stabil dalam berbagai aspek. Kekerasan, dan juga kriminalitas terjadi dan rezim 20 tahun lalu kembali diterapkan sejak awal berkuasanya kembali. Kebijakan ini juga menjadi konflik internal Afghanistan terutama bagi kaum perempuan yang menjadi sorotan kebijakan ini. Kaum perempuan mulai melakukan perlawanan, namun kurangnya hukum dan bantuan sehingga membatasi ruang gerak para perempuan. Kebijakan ini sangat dikecam oleh negara-negara seperti Swiss, Inggris Raya, Perancis dan juga AS melalui beberapa forum menyampaikan bahwa kebijakan yang ditetapkan bukan lagi peraturan yang baik dan mensejahterakan masyarakat namun sebaliknya malah mengikis Hak Asasi Manusia terutama hak fundamental perempuan dan anak. Dewan Keamanan PBB juga ikut serta mengecam tindakan yang dilakukan oleh Taliban, dan menekan Taliban agar segera menghentikan praktik kebijakan yang membatasi hak hidup manusia. Atas tindakan yang dilakukan oleh Taliban tersebut, PBB memberikan wewenang kepada United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) yang merupakan misi khusus yang ditugaskan PBB untuk menangani isu-isu yang terjadi di Afghanistan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini meneliti dalam kondisi alamiah yang lawannya merupakan eksperimen. Peneliti bertindak sebagai alat utama

dalam penelitian serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan (Sugiyono, 2020). Proses analisis data bersifat induktif dan temuan penelitian menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif dan condong pada analisis. Semakin dalam analisis, maka semakin unggul hasil penelitian. Dalam konteks ini, fokus penelitian yaitu dampak dan upaya yang dilakukan UNAMA dalam menanggapi kasus ketimpangan gender yang terjadi di Afghanistan dengan menggunakan Teori Feminisme Liberal (Wollstonecraft, 1967; Stuart Mil, 1970). Dengan menggunakan sumber-sumber sekunder seperti artikel ilmiah, buku, media daring, dan dokumen pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

Rezim Taliban di Afghanistan

Berdasarkan istilah kebahasaannya, Taliban memiliki makna yaitu pelajar, sehingga kebanyakan anggota kelompok Taliban merupakan pelajar madrasah yang kebanyakan berasal dari suku etnis Sunni Pashtun. Suku Pashtun merupakan salah satu etnis terbesar yang berada di Afghanistan. Dibawah kepemimpinan Muhammad Omar di awal kekuasaannya Taliban mengubah sistem Afghanistan menjadi *de facto* yaitu Kemiran Islam Afghanistan atau *Da Afghanistan Islami Amirat*. Di masa pemerintahannya, Taliban berhasil mengantongi pengakuan kedaulatannya oleh 3 negara yaitu Pakistan, Uni Emirat Arab, dan juga Arab Saudi. Namun negara-negara seperti AS, Inggris, dan negara besar lainnya tidak mengakui kedaulatan Rezim ini serta tidak terkecuali PBB yang merupakan organisasi internasional yang mengurus tentang isu-isu internasional termasuk mengenai kemanusiaan (Joseph J. Collins, 2018).

Akhir pemerintahan Taliban di tahun 2001 mengakibatkan kekosongan pemerintah di Afghanistan sehingga UNSC (United Nations Security Council) membentuk International Security Assistance Force (ISAF) hasil dari *bon agreement* yang merupakan bentuk pemerintah sementara untuk melindungi Afghanistan dari serangan balik yang dilakukan oleh kelompok Taliban. Ketika invasi yang dilakukan oleh AS terhadap Taliban, beberapa tokoh penting dan anggotanya berhasil menyelamatkan diri sehingga masih ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dalam pemerintahan sementara Afghanistan, Hamid Karzai terpilih sebagai ketua untuk mengisi jabatan yang ada di pemerintahan sementara melalui *bon agreement* tersebut (Desfi I. Salsabila, 2023).

Seperti yang disebutkan tadi, walaupun sudah kalah di tahun 2001 lalu, anggota kelompok dan tokoh penting tersebut berhasil kembali di tahun 2005 dengan melakukan penyerangan terhadap pasukan AS. Tindakan ini membentuk resistensi NATO untuk mengerahkan pasukannya. Munculnya NATO sebagai kekuatan baru di Afghanistan, menyulitkan pergerakan Taliban. Dalam rentang tahun 2005 ke 2021, Taliban tidak berhenti melakukan upaya penyerangan untuk mengambil alih Afghanistan, namun kekuatan antara pasukan NATO dan AS tidak sebanding dengan kekuatan kelompok Taliban, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Taliban selalu tidak membuahkan hasil. Hingga pada tahun 2018 Taliban kembali melakukan pembicaraan dengan AS mengenai pendudukannya di Afghanistan yang menghasilkan *Doha agreement* jelang 2 tahun setelahnya yaitu tahun 2020. Dalam *Doha agreement* tersebut terdapat kesepakatan antara AS dan Taliban dimana AS berkomitmen untuk menarik pasukannya jika Taliban berhenti untuk menyerang pasukan AS serta kelompok Al-Qaeda juga dilarang untuk beroperasi. Hal ini dilakukan karena, aktivitas militer yang

dilakukan AS terhadap Taliban serta Taliban terhadap AS, membawa dampak terhadap masyarakat sipil infrastruktur negara, dan juga anggota pasukan yang berjatuh setiap kali terjadinya penyerangan, sehingga AS mempertimbangkan *Doha agreement* tersebut. selain menarik pasukan, AS juga sepakat untuk menutup 5 markas militernya dalam jangka waktu 135 hari setelah penandatanganan kesepakatan perjanjian tersebut.

Penarikan pasukan yang dilakukan oleh AS dan juga NATO, dijadikan imbang oleh Taliban untuk kembali menguasai Afghanistan. tindakan ini dilakukan karena adanya perubahan kepentingan Internasional AS dimana Rusia, Iran, dan kawasan Asia Pasifik menjadi fokus utama AS untuk mencapai kepentingannya. Selain itu, adanya perjanjian Doha tersebut dimana adanya komitmen antara kedua belah pihak untuk kesepakatan perdamaian menjadi dasar AS beserta NATO menarik pasukannya. Namun ada alasan lain yang juga masih berkaitan dengan kepentingan nasional AS khususnya dimana selama hampir dua dekade AS menempatkan pasukannya di Afghanistan, telah menghabiskan banyak biaya operasi militer sebanyak \$144,98 miliar dan juga banyaknya anggota militer AS yang berjatuh di 20 tahun terakhir itu. Kemudian AS juga ingin berfokus pada upaya penanganan pandemi yang terjadi pada saat itu. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Joe Biden pada tahun 2018 kemudian dilanjutkan oleh Donald Trump di tahun 2020 (Edi F. Rahman, 2024).

Pembatasan Hak Perempuan Afghanistan oleh Taliban

1. Pendidikan

Kembalinya Taliban di tahun 2021 menjadi tanda juga kembalinya fase keterpurukan Afghanistan atas rezim yang ditetapkan. Perempuan tidak diperkenankan untuk menempuh pendidikan menengah dan hanya diberikan kesempatan sampai umur 12 tahun atau pendidikan dasar saja. Kemudian di tahun 2022 secara resmi rezim Taliban melalui kementerian pendidikannya memberlakukan kebijakan dengan menutup sekolah menengah dan perguruan tinggi yang telah dibangun sejak digulingkannya tahun 2001 lalu. Penutupan difokuskan pada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi siswa perempuan. Sebelum pemberlakuan kebijakan ini secara umum, masih ada beberapa sekolah menengah dan perguruan tinggi yang diizinkan untuk beroperasi namun dengan syarat bahwa para mahasiswi hanya boleh diajar oleh dosen/guru perempuan atau bahkan juga pengajar laki-laki tapi sudah lanjut usia. Kemudian beberapa larangan jurusan perkuliahan juga tidak dibuka bagi perempuan seperti kedokteran hewan, teknik, ekonomi dan pertanian, serta jurnalisme menjadi fokus pembatasan. dalam konteks pendidikan, hingga pada tahun 2023 sejumlah calon mahasiswi batal untuk mendaftar di universitas, serta sekitar 1,2 juta anak perempuan di atas 12 tahun tidak mendapatkan pendidikan formal (VOA, 2024). Dan 1,2 lainnya dikeluarkan secara terpaksa dari sekolah. Tindakan ini dilakukan karena sesuai dengan hukum Islam bahwa tidak boleh ada pencampuran gender antara perempuan dan laki-laki dan juga keperluan untuk memperbaiki silabus agar sesuai dengan ajaran hukum Islam. Kemudian di tahun 2024 tepatnya di bulan Maret, kembali perempuan diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus atau pelatihan tenaga medis khusus laki-laki di institut Ilmu Kesehatan Omid yang berlokasi di kota Kabul. Kebanyakan perempuan yang diterima untuk belajar di institusi ini merupakan tamatan sekolah menengah atas yang saat ini beberapa dibuka namun belum ada peresmiannya serta beberapa lulusan sekolah menengah atas sebelum Taliban berkuasa kembali (VOA, 2024). Namun mereka hanya diizinkan untuk mengikuti pembelajaran dari luar dan tidak diizinkan

secara langsung untuk ikut andil masuk ke dalam. Hal ini dilakukan oleh Taliban karena adanya desakan bahwa kurangnya tenaga medis perempuan khususnya perawat dan juga bidan karena dokter atau tenaga medis laki-laki tidak diperbolehkan untuk merawat atau menolong pasien perempuan (Human Rights Watch, 2024). Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh beberapa perempuan yang berusia sekitar 20-an, dan tidak jarang dari mereka yang meninggalkan keluarganya demi untuk menuntut ilmu dan mengabdikan kepada negara. Kebijakan ini juga didukung penuh oleh PBB dan diharapkan dengan dibukanya kursus pelatihan tenaga kesehatan perempuan akan memberikan dampak positif bagi sektor kesehatan di Afghanistan. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, dimana tepat pada Desember di tahun yang sama yaitu 2024, Taliban kembali menutup akses perempuan untuk mengikuti pelatihan tersebut (BBC News, 2024). Hal ini juga kembali menjadi kekhawatiran bagi PBB, Uni Eropa, dan organisasi HAM lainnya, dimana ini akan mengakibatkan kurangnya penanganan yang efektif terhadap perempuan, ibu dan juga anak dalam hal kesehatan yang berakhir pada krisis kesehatan di negaranya.

2. Pekerjaan

Kemudian larangan bekerja bagi perempuan dalam sektor publik dan swasta dikarenakan lingkungan yang dianggap kurang mendukung untuk perempuan dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga oleh juru bicara Taliban yaitu Zabihulla Mujahid di Agustus tahun 2021 mengatakan melalui BBC bahwa perempuan diharuskan untuk berdiam diri di dalam rumah hingga waktu yang belum bisa ditentukan untuk menjamin keamanan para perempuan dalam bekerja. Larangan ini terus berlanjut hingga di tahun 2022, dimana Taliban mulai melakukan penyempitan akses pekerjaan bagi perempuan untuk tidak bekerja dalam organisasi non pemerintah nasional maupun internasional seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga PBB. Namun dalam bidang kesehatan hanya gizi, pendidikan menjadi pengecualian dalam aturan ini. Selain itu pekerjaan seperti petugas kebersihan toilet perempuan juga diizinkan untuk terus beroperasi. Kemudian terdapat juga penutupan usaha kecil-kecilan seperti salon kecantikan yang dikelola oleh wanita (UN Women, 2024) yang mana usaha ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian tambahan wanita ketika adanya pelarangan pekerjaan di sektor LSM dan juga organisasi internasional. Pembatasan pekerjaan membuat perempuan tidak dapat menghasilkan uang sendiri, sehingga akan mempersulit kehidupan ekonomi terutama bagi keluarga yang berada di menengah ke bawah yang secara tidak langsung akan mengakibatkan kemiskinan. Semakin banyak pembatasan pekerjaan terhadap wanita maka akan menghasilkan kemiskinan yang juga akan berpengaruh pada perekonomian dan kestabilan negara.

Respon PBB Dalam Menghadapi Isu di Afghanistan

Atas tindakan yang dilakukan oleh Taliban kepada masyarakat Afghanistan, PBB terus menyerukan kepada otoritas *de facto* (Taliban) agar sedikit memberi kelonggaran atas beberapa kebijakan yang terindikasi melanggar hak asasi manusia, seperti pembatasan pendidikan dan juga pekerjaan tersebut. Kemudian juga terdapat respon dari negara anggota Dewan Keamanan PBB yaitu Ekuador, Prancis, Guyana, Malta, Mozambik, Republik Korea, Sierra Leone, Slovenia, Swiss, Inggris Raya, dan AS, mengatakan bahwa mereka sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Taliban terhadap masyarakat Afghanistan terkhususnya perempuan. Pada tahun 2023, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi 2681 mengenai pembatasan hak pendidikan dan pekerjaan wanita terkhususnya di organisasi internasional seperti PBB yang

bertempat di Afghanistan oleh Taliban. Melalui resolusi ini, dengan dukungan 90 negara termasuk Jepang, Perancis, dan Uni Emirat Arab, menyerukan agar Taliban segera mencabut pembatasan hak perempuan dan anak perempuan. Lalu penyeruan agar dibukakan akses wewenang kepada organisasi kemanusiaan PBB beserta jajarannya agar perempuan dapat berkontribusi di dalamnya. Namun Taliban menentang resolusi tersebut, karena menurut mereka kebijakan tersebut sudah sesuai dengan hukum syariat Islam, agar perempuan dan anak perempuan berada dalam posisi yang aman karena tidak berinteraksi atau melakukan aktivitas langsung dengan laki-laki di luar rumah.

September 2024 anggota Dewan Keamanan PBB kembali lagi mengadopsi resolusi 2681 yang sama seperti yang dilakukan di tahun 2023. Hal ini dilakukan karena tidak adanya respon positif oleh Taliban melalui resolusi yang dikeluarkan sebelumnya. Lewat forum tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan terhadap “undang-undang moralitas” yang diumumkan oleh Taliban dan mendesak Taliban agar menghentikan praktik dan kebijakan yang membatasi hak hidup dan fundamental anak perempuan dan wanita. Pembatasan hak fundamental tersebut hanya akan membuat negara tersebut berada dalam situasi yang tidak stabil dan juga rentan terhadap konflik internal, karena tidak terjadinya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dewan keamanan PBB juga mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh besar terhadap Afghanistan, untuk dapat berkerjasama mendorong dan menekan Taliban agar dapat menghentikan kebijakan tersebut. Afghanistan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan komitmen tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peratifikasian rezim CEDAW, karena ini bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dalam forum tersebut, mereka juga memberikan dukungan penuh terhadap UNAMA (*United Nations Assistance Missions in Afghanistan*) yang merupakan misi bantuan PBB di Afghanistan untuk menyelesaikan persoalan ini, segera membebaskan anak perempuan dan wanita dari belenggu rezim Taliban. Misi ini menjadi harapan bagi anggota DK PBB dan juga PBB agar mengurangi anak-anak dan perempuan yang kehilangan kesempatan dan mimpi bagi masa depan mereka.

Upaya UNAMA Dalam Bidang Pendidikan dan Pekerjaan

United Nations Assistance Missions in Afghanistan (UNAMA) terbentuk di tahun 2002 oleh PBB atas permintaan pemerintahan Afghanistan karena adanya bentrok antara masyarakat sipil agar membantu mewujudkan perdamaian dan kestabilan dimana Afghanistan pada saat itu masih mengupayakan perbaikan sistem negaranya setelah kemunduran Rezim Taliban. UNAMA telah bekerja keras sebelumnya dengan memperkuat institusi-institusi nasional nasional dengan mempromosikan HAM, memfasilitasi dialog politik, dan juga memberikan dukungan pada upaya rekonsiliasi nasional. Visi utama UNAMA di Afghanistan yaitu untuk perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan serta masyarakat sipil, pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan, rekonsiliasi dan detensi.

UNAMA berperan sebagai Aktor dan juga Arena (Endah, et.all., 2024). UNAMA bertindak sebagai aktor advokasi dan juga melakukan pemantauan terhadap setiap pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari rezim Taliban atau bahkan dari kelompok-kelompok Taliban itu sendiri, karena tidak jarang perempuan mendapatkan perlakuan kekerasan jika terlihat melanggar kebijakan Taliban atas mereka. Kemudian hasil pantauan dan laporan yang terima tersebut akan menjadi dasar utama UNAMA melakukan laporan kepada pemerintahan *de facto* untuk meninjau kembali beberapa kebijakan yang merugikan negara serta kaum perempuan.

Kemudian dalam menjalani perannya sebagai arena UNAMA bekerjasama dengan UN Women menyediakan fasilitas dialog antara pemimpin senior PBB dengan pemimpin organisasi perempuan untuk membahas tentang isu-isu krisis kemanusiaan yang terjadi melalui *Global Open Days*. Hasil dari diskusi forum tersebut menyangkut aspek pendidikan dan menjadi isu utama pembahasan, peningkatan perlindungan keselamatan dan keamanan bagian perempuan yang bekerja di sektor pendidikan tinggi, media, dan bisnis. Di Desember tahun 2024, *Wellness Prosperity and Socio-empowerment Organization* (WPSO) melakukan konsultasi dengan lebih dari 500 aktivis perempuan dan juga perwakilan pemerintahan provinsi di Afghanistan guna untuk membahas mandat UNAMA. Berdasarkan konsultasi dengan jumlah sebanyak 20 provinsi menyatakan bahwa beberapa provinsi seperti Bamian, Farah, Daikundi, Jawzjan, Maidan Wardak, Zabul terdapat upaya yang signifikan yang dilakukan oleh UNAMA dalam memberikan bantuan terhadap hak pendidikan dan pekerjaan. Provinsi Damian merupakan provinsi yang cukup berbeda secara signifikan dengan provinsi lainnya dimana pemberlakuan kebijakan-kebijakan kontroversial Taliban tidak diberlakukan secara ketat disini sehingga UNAMA memiliki sedikit kelonggaran untuk melakukan upaya advokasi penghapusan syarat kementerian tenaga kerja Taliban yang berupaya untuk memasukkan gaji karyawan sebagian ke dalam kasnya, kemudian juga berhasil bekerjasama dalam implementasi di departemen ekonomi dan departemen sektoral lainnya. Sehingga upaya dari ini menghasilkan banyak perempuan di Bamian yang sudah terlibat dalam perdagangan, pekerjaan, dan juga kepemilikan bisnis yang membuat mereka mendapatkan peluang untuk memperluas kemandirian dan juga stabilitas ekonomi mereka. Kemudian di provinsi Farah UNAMA berhasil mempengaruhi dan mengadvokasi otoritas lokal dalam sektor kesehatan agar memberikan pelayanan yang baik kepada kaum perempuan, kemudian perlindungan terhadap gaji karyawan, dan juga dalam penjara perempuan. Kemudian Daikundi, UNAMA berhasil melakukan kegiatan pertemuan dengan penanggung jawab bidang pendidikan, kesehatan, informasi, dan juga bidang swasta. Walaupun masih kurang efektif karena kondisi perjalanan yang membutuhkan waktu lama sekitar 18-20 jam melakukan perjalanan darat karena tidak ada kantor UNAMA khusus di daerah tersebut tetapi melalui kantor yang berada di provinsi Bamian. Lalu Provinsi Jawzjan, UNAMA berhasil melakukan advokasi untuk kembali membuka sekolah dan juga universitas, selain itu juga terdapat upaya penyertaan perempuan dalam kegiatan sosial. Di Maidan Wardak, maraknya pernikahan dini sehingga UNAMA mengencarkan pengurangan aktivitas ini dengan cara memberikan jumlah tetap pada biaya pernikahan dini. Dan yang terakhir yaitu provinsi Zabul, UNAMA memberikan dukungan dalam sektor pendidikan bagi anak perempuan untuk mengurangi tingkat buta huruf dan juga pemberdayaan sosial. Selain itu juga, UNAMA memperkuat institusi lokal dengan menerapkan program yang berfokus pada implementasi keterampilan manajemennya. Lalu 14 provinsi lainnya seperti Kabul, Ghazni, Ghor, Kunduz, Herat, Kapisa, Badakhsan, Takhar, Paktia, Nuristan, Uruzgan, Paktika, dan juga Panjshir masih menjadi inisiasi upaya yang dilakukan oleh UNAMA karena belum ada upaya yang cukup signifikan dalam pelaksanaan tugas dan peran advokasinya. Wilayah Kunduz, Herat, dan juga Kabul menjadi wilayah yang paling menantang, dikarenakan ketiga provinsi ini merupakan wilayah utama penguasaan Taliban, dimana Taliban selalu menolak untuk melakukan negosiasi mengenai advokasi yang menyangkut tentang pendidikan dan pekerjaan. Sehingga bentuk diskriminasi, kemiskinan, kelaparan, dan pembatasan hak masih terus terjadi dan menjadikan wilayah tersebut yang paling parah daripada provinsi yang lainnya.

KESIMPULAN

Isu kesetaraan gender menjadi fokus perhatian bagi seluruh masyarakat di dunia tidak terkecuali organisasi internasional seperti PBB. Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan menjadi penentu kestabilan perdamaian dunia, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kasus-kasus ketimpangan dan diskriminasi gender. Afghanistan merupakan negara islam yang mempunyai sejarah panjang mengenai kebijakan dalam dan luar negerinya. Berkuasanya Taliban menjadi polemik global karena beberapa kebijakan kontroversialnya yang menitik beratkan pada anak perempuan dan juga perempuan. Kebijakan yang sudah menyentuh ranah pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena adanya pembatasan pendidikan dan pekerjaan bagi kaum perempuan. Merespon hal ini, PBB yang berperan sebagai organisasi internasional mengenai perdamaian dunia membentuk misi khusus untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi yaitu *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA). Dibawah naungan PBB dan juga dukungan para negara anggota tetap maupun tidak tetap, UNAMA mengusahakan berbagai kebijakan agar sedikit menekan kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut melalui advokasi, dan juga arena. Dengan advokasi, UNAMA melakukan memantau dan memberikan laporan kepada pihak *de facto* atas kebijakan yang sudah melanggar HAM, kemudian memfasilitasi dialog antara pemimpin tertinggi *de facto* dengan PBB guna membahas isu permasalahan kebijakan Taliban tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun (2023-2024), UNAMA berhasil memberikan bantuan kepada masyarakat afghanistan terkhususnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Di beberapa provinsi seperti Bamian, Farah, Daikundi, Jawzjan, Maidan Wardak, Zabul, hak pendidikan dan pekerjaan perempuan mulai sedikit diberi kelonggaran. Sekolah menengah dan universitas bagi perempuan sudah mulai dibuka dan UNAMA bekerjasama dengan beberapa LSM agar membuka lowongan pekerjaan bagi wanita dan juga menekan kebijakan Taliban mengenai pemotongan gaji karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baoping, L. (2022). Tracking gender inequality: Definitions, trends, and policy designs. *Journal of Gender Studies*, 15(3), 155–172.
- [2] BBC News Indonesia. (2024, Januari 12). *Perempuan Afghanistan “dilarang mengikuti kursus kebidanan” oleh Taliban*. <https://www.bbc.com/indonesia>
- [3] Diplomacy France. (2023). *UN Afghanistan Security Council Resolution condemning the Taliban’s decisions to prohibit Afghan women from working for the UN in Afghanistan*. <https://www.diplomatie.gouv.fr/>
- [4] Gul, A. (2024). *Taliban izinkan perempuan kuliah di institut milik pemerintah*. *Voice of America*. <https://www.voaindonesia.com/>
- [5] Hak, A., Rahmah, S., & Nuraini, T. (2022). Pelanggaran hak perempuan di Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban berdasarkan Konvensi CEDAW. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(1), 23–38.
- [6] Mawardi, H., Lubis, M. S., & Hidayat, A. (2022). Politik kekerasan Taliban di Afghanistan: Telaah historis-sosiologis perspektif Weberian. *Jurnal Politik dan Sosial*, 17(2), 45–60.

- [7] Molle, R., Yuliani, N., & Hamid, F. (2023). Pembatasan terhadap hak-hak perempuan oleh Taliban: Perspektif Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(2), 41–56.
- [8] Nurfaah, R., Azizah, M., & Kurniawan, R. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 89–102.
- [9] Sahat, M. (2024). Taliban Afghanistan larang pelatihan medis untuk wanita: Menutup salah satu celah terakhir dalam pendidikan perempuan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/>
- [10] Salsabila, A. (2023). *Latar belakang berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan pada tahun 2021*. Universitas Gadjah Mada.
- [11] Setyowati, F. (2021). *Konvensi internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita & dukungan Indonesia melalui ratifikasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- [12] Shamil, M. (2021). *Bagaimana invasi AS mengubah Afghanistan?* <https://www.kompas.id/>
- [13] Sudirman & Susilawaty, D. (2022). Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Suatu review literatur sistematis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 12–25.
- [14] Tempo. (2021, Oktober 7). *Hari ini 20 tahun lalu kilas balik kekalahan Taliban di 2001: Akar dan sebabnya*. <https://www.tempo.co/>
- [15] UN Women. (2024). *FAQ: Perempuan Afghanistan tiga tahun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan*. <https://www.unwomen.org/>
- [16] VOA Indonesia. (2024, Februari 10). *Taliban 'sengaja' larang 1,4 juta anak perempuan Afghanistan bersekolah*. <https://www.voaindonesia.com/>
- [17] Winkelmann, I. (2021). *Resolution 2681*. United Nations Security Council. <https://www.un.org/securitycouncil/>